

ADU KUAT DANA KAMPANYE PRABOWO-GIBRAN PALING 'JUMBO'

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis informasi mengenai laporan kampanye dan dana kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden di laman resmi infopemilu.kpu.go.id. Tiga paslon peserta Pilpres 2024 pun saling adu kekuatan anggaran. Menurut data, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mencatatkan dana awal kampanye paling besar. Jumlah dana awal kampanye paslon yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, PBB, Garuda, dan Prima ini tembus Rp 31,4 miliar. Di sisi lain, isu lonjakan transaksi janggal terkait dana kampanye laporan PPAATK makin kuat berembus. Meski desakan pengusutan secara tuntas menggaung, tapi KPU dan Bawaslu hingga belum juga melaporkan hasilnya. Lalangan pengamat pun menganggap isu ini muncul tiap pemilu, dan menuding bila regulasi kepemiluan memang didesain agar pertanggungjawaban dana kampanye tak bisa diwujudkan. Duh!

baca di hal 11...

**Government (Hal.2)
Beli LPG 3 Kg
Wajib Daftar
Sebelum
1 Januari 2024**

RP 1 M

RP 23 M

RP 31.4 M

DANA KAMPANYE ANIES-MUHAIMIN MD PADA PEMILU 2024 (RP)

SUMBER DANA	UANG	BARANG	JASA	TOTAL
Paslon	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
Partai	0	0	0	0
Perseorangan	0	0	0	0
Kelompok	0	0	0	0
Perusahaan	0	0	0	0
TOTAL	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000

DANA KAMPANYE PRABOWO-GIBRAN PADA PEMILU 2024 (RP)

SUMBER DANA	UANG	BARANG	JASA	TOTAL
Paslon	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
Partai	0	600.000.000	28.838.800.000	29.438.800.000
Perseorangan	0	0	0	0
Kelompok	0	0	0	0
Perusahaan	0	0	0	0
TOTAL	2.000.000.000	600.000.000	28.838.800.000	31.438.800.000

DANA KAMPANYE GANJAR-MAHFUD MD PADA PEMILU 2024 (RP)

SUMBER DANA	UANG	BARANG	JASA	TOTAL
Paslon	51.000.000	0	0	51.000.000
Partai	2.950.000.000	0	0	2.950.000.000
Perseorangan	1.670.999	0	0	1.670.999
Kelompok	0	0	0	0
Perusahaan	20.324.250.000	0	0	20.324.250.000
TOTAL	23.326.920.999	0	0	23.326.920.999

Beli LPG 3 Kg

Wajib Daftar Sebelum 1 Januari 2024

JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilo gram (kg) wajib mendaftar sebelum 1 Januari 2024.

Pasalnya, mulai awal tahun depan pembelian LPG bersubsidi itu hanya dapat dilakukan oleh konsumen terdaftar.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menghimbau masyarakat yang belum terdaftar agar segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG tabung 3 Kg. "Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Penyalur/Pangkalan resmi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK," ujar Tutuka dalam keterangannya yang dikutip Selasa (19/12/2023).

Tutuka mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi konsumen. Ia menjelaskan, pemerintah dan Badan Usaha Penerima Penugasan (PT Pertamina) menjamin data konsumen LPG tabung 3 Kg yang sudah terdaftar dan terdata di merchant app Pertamina akan terlindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran," kata Tutuka.

Sebagai informasi, sejak November 2023, lebih dari 27,8 juta pengguna LPG Tabung 3 Kg telah melakukan transaksi melalui aplikasi merchant Pertamina di pangkalan resmi. Pemerintah mendorong pendaftaran



(Ilustrasi) Mulai awal 1 Januari 2024 pembelian LPG bersubsidi itu hanya dapat dilakukan oleh konsumen terdaftar. (dok)

segera bagi pengguna yang belum terdata untuk meningkatkan efisiensi pendataan.

Proses pendataan ini, kata Tutuka, merupakan komitmen pemerintah yang tercantum dalam Nota Keuangan Tahun 2023, untuk mengubah subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.

Pendataan Sejak Maret 2023

Pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg sebagai langkah awal proses transformasi ini dilaksanakan sejak 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2023.

Dijelaskan Tutuka bahwa pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun 2023 yang menyatakan komitmen Pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima atau by name by address dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.

Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

perlu dilakukan secara tepat sasaran mengingat LPG Tabung 3 Kg ini juga merupakan barang penting sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Selain itu LPG Tabung 3 Kg juga memiliki sasaran pengguna yakni rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.

Sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut Pemerintah dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

"Pemerintah telah menerbitkan petunjuk teknis dan aturan pelaksana sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan transformasi

pendistribusian LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran", tutup Dirjen Migas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengidentifikasi adanya kebocoran penyaluran elpiji 3 kg dari jalur distribusi resmi hingga ke tingkat pengecer. Jumlahnya sekitar 1,5 juta ton.

Sedikit informasi, realisasi penyaluran elpiji tabung 3 kg pada tahun 2022 mencapai 7,80 juta MT. Sedangkan pada 2023 kuota elpiji tabung 3 kg sebesar 8,00 juta MT termasuk cadangan 0,5 MT. Hingga Juli 2023, realisasi penyaluran elpiji subsidi atau elpiji 3 kg sebanyak 58 persen dari kuota yang ditetapkan. Sementara penyerapan anggaran subsidi elpiji 3 kilogram sampai pada Oktober 2023 yakni mencapai Rp52,2 triliun atau 6,1 juta metrik ton (MT) dari anggaran yang disiapkan sebanyak Rp117,85 triliun (wid,rls,ist/dya)

HARGA JUAL LPG PERTAMINA BRIGHT GAS 5,5 KG DAN 12 KG DI TINGKAT AGEN (22 NOVEMBER 2023)*

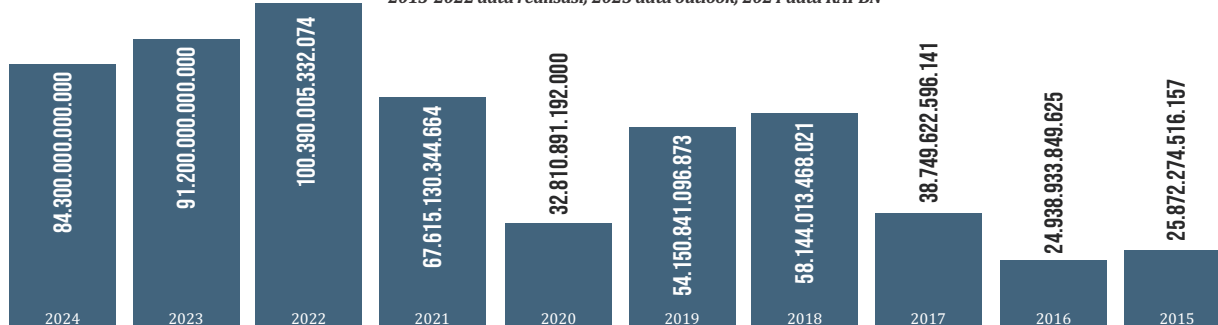
KET : *) sudah termasuk PPN

Provinsi	5.5 Kg	12 Kg
Jawa-Bali-NTB	92.000	192.000
Aceh-Sum-Kepri-Jam-Lam	94.000	194.000
Sulsel-Sulteng	94.000	194.000
Bangka Belitung	97.000	202.000
Kalbar-Kalteng-Kalsel-Kal	97.000	202.000
Gor-Sulut-Sultra	97.000	202.000
Kalimantan Utara	107.000	229.000
Maluku-Papua	117.000	249.000

Rupiah Per Tabung

ANGGARAN BELANJA SUBSIDI LPG INDONESIA (2015-2024)*

*2013-2022 data realisasi; 2023 data outlook; 2024 data RAPBN



Praperadilan Kandas, Firli Tetap Tersangka Pemerasan



Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) berunjuk rasa menuntut PN Jakarta Selatan menolak praperadilan Ketua nonaktif Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan SYL. (ist)

JAKARTA-Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terkait penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dengan kandasnya gugatan itu, Firli Bahuri sah dan tetap berstatus tersangka.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Imelda di PN Jaksel, Selasa (19/12/2023). Hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok permohonan sehingga vonis tersebut diambil.

Diketahui, sidang praperadilan Firli ini dimulai sejak 11 Desember 2023. Dalam sidang ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjadi pihak termohon. Dalam perjalanannya, Firli menghadirkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebagai saksi meringankan. Selain itu, Firli juga menghadirkan pakar hukum Yusril Iha Mahendra sebagai ahli.

Dalam sidang itu juga, terungkap bahwa Firli pernah menerima uang sebanyak empat kali penyerahan yang diduga dilakukan pihak SYL di sejumlah lokasi yang berbeda. Nilai uang yang disebut diterima oleh Firli fantastis, mencapai total Rp 3,8 miliar. Firli membantah soal penerimaan uang tersebut.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya masih menunggu hasil penelitian jaksa usai melimpahkan berkas perkara Firli Bahuri dalam dugaan pemerasan SYL ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Telah kami sampaikan sebelumnya pada teman-teman media tim penyidik telah menyerahkan atau mengirimkan bekas perkara atau tahap pertama kepada JPU pada kantor Kejati DKI Jakarta dalam rangka penelitian berkas perkara," ujar Dirreskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (19/12/2023).

Ade menuturkan, hingga saat ini

belum ada menerima pengembalian berkas apa pun setelah melimpahkannya. "Nah ini terus masih kami tunggu apa hasil penelitian JPU yang telah ditunjuk pada P16 terkait dengan pemberkasan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan," sambung Ade.

Berkas perkara itu dilimpahkan pada Jumat 15 Desember 2023. Berdasarkan gambar yang diterima kumparan, berkas tersebut memiliki ketebalan yang cukup tinggi.

Ade mengatakan tebalnya diperkirakan sebanyak 10 ribuan halaman atau setinggi lutut kaki orang dewasa. "Ya diperkirakan ya, intinya berkas perkara setinggi 0,85 meter," tutup Ade.

DPR soal Tuduhan ke Kapolda Metro Jaya

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukhtianto meminta Polri segera mengusut kebenaran dari tuduhan adanya intervensi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan suap jalur kereta di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) yang menyeret pengusaha Muhammad Suryo (MSuryo).

Apalagi, intervensi itu dilakukan Karyoto karena diduga ingin melindungi M Suryo dari status tersangka dalam kasus tersebut. Polri diminta menindak tegas siapapun yang mencoba menghalangi pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Jika ada indikasi atau potensi ada aparatnya yang melakukan penyimpangan dan bahkan menghalangi-halangi pemberantasan korupsi, maka harus segera ditindak tegas dan diberi sanksi seberat-beratnya," kata Didik.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, tidak boleh ada toleransi terhadap siapapun yang ingin melindungi kejahatan. Menurutnya,

'pembersihan' oknum dalam lembaga penegak hukum harus dilakukan dengan cara-cara konkret.

"Jangan ada toleransi terhadap oknum yang nakal yang melindungi kejahatan. Jangan ada ampun terhadap oknum penegak hukum yang nakal. Lantai yang kotor tidak akan mungkin bisa dibersihkan dengan sapu yang kotor," kata Didik.

Di sisi lain, sepengetahuan Didik, M Suryo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Status tersangka itu bahkan telah diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Sehingga, kata dia, sangat aneh jika di ujung penanganan kasus suap DJKA Kemenhub, KPK mencabut status tersangka M Suryo ini juga nantinya diyakini bakal menambah deretan panjang tragedi nahas pemberantasan korupsi.

"Akan menjadi ajaib dan bin aneh jika tidak ada alasan yang dibenarkan UU, KPK mencabut kembali penetapan status tersangka Muhammad Suryo. Jika terjadi, ini juga akan menambah deret panjang tragedi mengesankan pemberantasan korupsi kita," katanya.

Bagi Caleg DPR RI Dapil Jatim IX itu, apapun alasannya kesaksian Firli dalam sidang praperadilan itu harus menjadi warning untuk KPK dan Polri. Kewaspadaan diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melindungi tersangka korupsi.

"Apun info dan beritanya, tentu harus menjadi atensi dan perhatian kita semua termasuk aparat penegak hukum. Perlu kewaspadaan lebih awal dan pengawasan yang melekat agar tidak terjadi abuse of power termasuk upaya-upaya untuk melindungi koruptor dan juga menghalangi-halangi pemberantasan korupsi," tegasnya.

Tim hukum Firli mengungkap dugaan adanya ancaman dari Karyoto terhadap pimpinan dan penyidik KPK terkait penetapan tersangka pengusaha M Suryo, dalam pengembangan perkara kasus suap di DJKA Kemenhub.

Firli menyebut Karyoto menetapkannya sebagai tersangka untuk melindungi pengusaha M Suryo, yang disebut tersandung kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Firli menyebut Karyoto mengancam pimpinan KPK untuk tidak menetapkan Suryo sebagai tersangka.

"Bahwa penyelidikan dan penyidikan perkara a quo, menurut pemohon, tidak bisa dianggap sebagai suatu upaya penegakan hukum yang murni, mengingat rekam jejak panjang hubungan antara pemohon dengan termohon," kata kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, yang membacakan replik tersebut, pada Kamis (14/12/2023). (wid,rls,ist/dya)

TENTANG FIRLI

DIJERAT BERBAGAI PASAL

Firli menjadi tersangka dengan jeratan pasal berlapis, yakni: Pasal 12e, Pasal 12B, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ANCAMAN HUKUMAN

Pidana seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda paling sedikit sebesar Rp 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar.

BERBAGAI BUKTI YANG DIMILIKI POLISI

Pernyataan 91 saksi antara lain anak buah Firli dan Syahrul Yasin Limpo, serta tujuh orang ahli. Hasil pengecekan dua rumah Firli di Jakarta Selatan dan Bekasi yang merupakan dokumen dan barang elektronik, pecahan penukaran valas dari beberapa money changer atas mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan jumlah terkonversi Rp 7.468.711.500 sejak Februari 2021 sampai September 2023. Diberhentikan Sementara

TIMELINE KASUS FIRLI

Juni 2023

Penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dimulai. KPK memanggil Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk diperiksa. KPK juga mengecehkan rumah dinas SYL.

12 Agustus 2023

Polda mendapatkan laporan masyarakat mengenai pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK.

21 Agustus 2023:

Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk dugaan kasus korupsi Firli.

5 Oktober 2023

Enam orang sudah diperiksa terkait kasus tersebut termasuk Syahrul Yasin Limpo, sopir, dan ajudan Firli. "Tim penyidik mulai melakukan undangan klarifikasi terhadap enam orang," kata Ade Safri Simanjuntak saat konferensi pers.

6 Oktober 2023

Foto Firli dan SYL bertemu di GOR Tangki Mangga Besar menjadi viral di media sosial. Firli klaim pertemuan itu terjadi sebelum kasus korupsi di Kementan diurus oleh KPK.

9 Oktober 2023

Polda menaikkan status perkara dugaan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

11-13 Oktober 2023

Polda memeriksa Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar dan ajudan Firli, Kevin Egananta Joshua. Dua orang itu terlibat dalam mengatur pertemuan antara SYL dan Firli, juga dalam penyerahan uang untuk Firli pada Juni 2022.

24 Oktober 2023

Polda Metro Jaya memeriksa Firli Bahuri. Ketua KPK itu sempat mengubah tanggal pemeriksaan dengan alasan sedang bertugas.

26 Oktober 2023

Polda mengecehkan dua rumah Firli di Jakarta dan Bekasi dan menemukan berbagai barang bukti.

13 November 2023

Firli kembali diperiksa oleh Polda Metro Jaya.

12 Desember 2023

Praperadilan Firli ditolak



Tanda Bahaya dari Bank Dunia Indonesia Cs di Ambang Krisis akibat Utang

JAKARTA - Bank Dunia mengumumkan data terbaru terkait utang negara-negara berkembang. Laporan itu menyimpulkan posisi negara berkembang yang mungkin dapat terkena krisis karena utang, termasuk Indonesia.

Secara rinci, negara-negara berkembang mengeluarkan dana sebesar US\$ 443,5 miliar (Rp 6.800 triliun) untuk melunasi utang publik dan jaminan publik mereka pada 2022. Peningkatan pengeluaran ini pun menggeser kebutuhan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Pembayaran utang, termasuk pokok dan bunga, meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di semua negara berkembang. Ini padahal terjadi saat era suku bunga tinggi menghantam dunia.

"Tingkat utang yang sangat tinggi dan suku bunga yang tinggi telah menempatkan banyak negara di jalur menuju krisis," kata Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Grup Bank Dunia, dikutip dari CNBC International, Selasa (19/12/2023).

Tak hanya suku bunga, penguatan dolar AS menambah kesulitan negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah ke bawah, membuat mereka kesulitan melakukan pembayaran. Dalam situasi seperti ini, kenaikan suku bunga lebih lanjut atau penurunan tajam pendapatan ekspor dapat membuat berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

"Setiap triwulan di mana suku bunga tetap tinggi mengakibatkan semakin banyak negara berkembang yang tertekan dan menghadapi pilihan yang sulit untuk melunasi utang publiknya atau berinvestasi pada bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan infrastruktur."

"Situasi ini memerlukan tindakan yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah debitur, swasta dan negara-negara berkembang," paparnya lagi.

Ketika biaya pembayaran utang meningkat, pilihan pembiayaan baru bagi negara-negara berkembang pun berkurang. Pada 2022, komitmen pinjaman eksternal baru kepada entitas publik dan entitas yang dijamin publik di negara-negara tersebut turun sebesar 23% menjadi US\$ 371 miliar (Rp 5.700 triliun) tingkat terendah dalam satu dekade.

Kreditor swasta sebagian besar abstain dari negara-negara berkembang, menerima pembayaran pokok sebesar US\$ 185 miliar (Rp 2.863 triliun) lebih banyak daripada yang mereka berikan dalam bentuk pinjaman. Hal ini menandai pertama kalinya sejak 2015 kreditor swasta

menerima lebih banyak dana daripada yang mereka masukkan ke negara-negara berkembang.

Obligasi baru yang diterbitkan oleh semua negara berkembang di pasar internasional turun lebih dari setengahnya pada 2021 hingga 2022, dan penerbitan surat utang negara-negara berpendapatan rendah turun lebih dari tiga perempatnya.

"Ketika pembiayaan dari kreditor swasta semakin berkurang, Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya turun tangan untuk membantu menutup kesenjangan tersebut," tambah laporan itu.

"Kreditor multilateral memberikan US\$ 115 miliar pembiayaan baru berbiaya rendah pada tahun 2022, hampir setengahnya berasal dari Bank Dunia."

Utang Luar Negeri RI Tinggi

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 sebesar 392,2 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6.080 triliun (asumsi kurs Rp15.503 per miliar Dolar AS). Jumlahnya meningkat sekitar 2,3 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan utang luar negeri Indonesia, terutama dari beban utang pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin tidak terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dia menuturkan, kenaikan beban pembayaran bunga ULN pemerintah mencapai 36,4 persen secara tahunan, namun pertumbuhan ekonomi Tanah Air hanya berkisar 5 persen.

"Makin dikhawatirkan tambahan beban bunga utang menciptakan crowding out effect yang menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang," kata Bhima.

Dengan bunga utang yang cukup tinggi di pasar, kata Bhima, banyak investor akhirnya memilih parkir dana di surat utang valuta asing (valas) pemerintah dibanding investasi di sektor produktif. Lebih lanjut,



(Ilustrasi) Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 sebesar 392,2 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6.080 triliun. (Dok)

indikator risiko utang lainnya dilihat dari kemampuan dalam membayar utang. Debt Service Ratio (DSR) Tier 2 pada 2014 memiliki angka 33,3 persen, sementara pada Oktober 2023 melonjak ke 38,6 persen. "Artinya, kenaikan utang luar negeri belum diimbangi oleh kemampuan menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor. Ini kurang sehat ya dalam jangka panjang," lanjut Bhima.

Pemerintah semestinya tidak secara sederhana menghitung proporsional ULN hanya dengan ambang batas melalui PDB. "Belajar dari kasus krisis utang di Eropa tahun 2015 ada negara dengan rasio utang di bawah 60 persen masuk pasien IMF, sementara negara dengan rasio utang di atas 60 persen ada yang baik-baik saja," ucap dia.

Sebagai langkah pengelolaan atas ULN Indonesia yang tinggi, pemerintah dinilai perlu memperhatikan penerbitan utang valas yang harus direm karena risiko fluktuasi kurs bisa sebabkan selisih yang cukup memberatkan APBN. Selain itu, porsi kepemilikan asing yang berkurang di Surat Berharga Negara (SBN) mengindikasikan dana domestik digunakan untuk menutup gap kebutuhan utang.

Selanjutnya, pemerintah harus berani melakukan renegosiasi utang dengan instrumen debt swap for nature dan debt cancellation atau penghapusan pokok dan bunga utang.

Indonesia bisa mengikuti Bridgetown Initiative untuk membuka ruang negosiasi dengan kreditor.

Jika dilihat pergerakan ULN Indonesia secara bulanan, sejatinya posisi ULN di bulan Oktober tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2023 yang sebesar 394,4 miliar dolar AS. Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 tercatat 185,1 miliar dolar AS. Jumlah ini melambat 3,3 persen dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang ada di level 188,3 miliar dolar AS.

Kemudian, posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar 196,9 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 196,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5 persen. Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7 persen, dari 28,9 persen pada bulan sebelumnya. (wid,vnbc,tir/dya)



"Makin dikhawatirkan tambahan beban bunga utang menciptakan crowding out effect yang menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang,"

Bhima Yudhistira

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios)

Peringati Hari Nusantara, DKP Jatim Gelar Sapa Nelayan

SURABAYA- Dalam memperingati hari Nusantara ke-24 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara sapa nelayan di taman hiburan (THP Utara) jalan Pantai Ria Kenjeran Kecamatan Bulak yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dr Muhammad Isa Ansori ATD., M.T.

Tampak hadir pula Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur H. Alyadi Mustofa, S. I. P; para Forkopimda Jatim diantaranya Pamen Ahli Bidang Ideologi Politik Brawijaya Kolonel ARH. Budiono, S.T, Direktur kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin S.H., S.I.K., M.H, Aspotmar Lantamal V Surabaya Kolonel Mar.asrof, Kasi Proksarin Intelejen Kejati Jatim Ikrar Demarkasi, Bupati Ngawi H. Ony Anwar Harsono, S.T., M.H. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jatim Ir. Muhammad Gunawan Saleh M.M beserta para KA OPD Provinsi Jatim.

Juga dihadiri para Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Jatim Dr Mas Purnomo Hadi, M.M dan Ir Hadi Sulistyio, M.Si, Para Sekda Kab/Kota diantaranya Sekda Kab. Kediri Sekda Kab. Sidoarjo, Sekda Kab. Malang serta Sekda Kota Surabaya. Tak ketinggalan Wakapolres Tanjung Perak Kopol Wahyu Norman Hidayat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Pamekasan Ir. Nurul Widiastuti, Kasi Barang Bukti Kejari Surabaya Rizal Prawata, Kasdim



0832 Surabaya Selatan Letkol Inf. Arief Widi, Kasdim 0831 Surabaya Timur Letkol Arh. Adnan, Ka. Bu Binmas, Polrestabes Surabaya Akp Gusti, Para Ka. Diskanla Kab/Kota Yang Hadir, Para Penerima Penghargaan Serta Para Nelayan, Pembudidaya, Pengolah Ikan Dan Himpunan Masyarakat Pengawas Yang Hadir

Dalam sambutannya Khofifah Indar Parawansa bercerita mengenai masuknya Indonesia sebagai UNCLOS (United Nations Convention on The Law of the Sea).

Dikatakannya, pada tahun 1999 Khofifah berkesempatan bertemu langsung dengan ajudan Bung Karno yang mendampingi presiden pertama RI tersebut dalam pertemuan PBB di tahun 1957. Dalam kesempatan itu, Soekarno mengatakan Indonesia

adalah negara kepulauan. Pada tahun 1985, Indonesia pin masuk sebagai UNCLOS.

"Bung Karno menyampaikan pulau-pulau di Indonesia dipersatukan oleh laut jadi kalau berlaku zona ekonomi eksklusif betapa di tengah-tengah laut kita sudah melihat kapal internasional lalu lalang. Maka bung Karno meminta kepada PBB memberikan persetujuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan oleh karenanya laut adalah pemersatu bagi Indonesia, laut bukan pemisah," ungkapnya

Sementara itu kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dr Muhammad Isa Ansori ATD., M.T menyebut acara Sapa Nelayan untuk memaknai dan mengenang deklarasi Djuanda dan meningkatkan



kecintaan kita terhadap laut. Sebagai informasi Hari Nusantara tingkat Nasional diadakan di Tidore dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat penghargaan dari presiden.

"Acara ini bertemakan Ikan untuk Generasi Emas 2045 dan Hari Nusantara tingkat Nasional diadakan di Tidore dan Insya Allah gubernur jatim mendapatkan Penghargaan tertinggi dari presiden Satya Lencana Wira Karya yang akan diberikan di Tidore, hanya dua gubernur yang dapat Jawa Timur dan Sumatera Barat," ujarnya

Ia juga mengungkapkan acara yang dihadiri kurang lebih 2.500 orang ini bisa memberikan dampak dan dukungan besar pada kelautan Indonesia. (ADV)

Jelang nataru, 3 Maskapai Langgar Ketentuan Harga Tiket Pesawat



Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati

JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan dua sampai tiga maskapai yang menaikkan tarif tiket hingga melanggar tarif batas atas (TBA). Hal inilah yang menyebabkan tarif tiket pesawat terus melambung

tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahkan pihaknya sudah menemukan sejumlah maskapai yang melanggar TBA sebelum momentum Nataru. Pelanggaran tersebut khususnya terjadi di saat ada rute-rute tertentu yang hanya dioperasikan

oleh satu maskapai.

Meski demikian, dia tidak membeberkan lebih rinci soal kapan pelanggaran tersebut terjadi dan maskapai mana yang melanggar.

"Saya harus lihat datanya lagi (berapa banyak maskapai yang melanggar). Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa maskapai yang melanggar. Sebelum Nataru sudah ada. Adalah 2-3 maskapai," kata Adita kepada awak media, di Gedung Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Lebih lanjut, Adita mengakui memang maskapai cenderung menaikkan harga tiket hingga mendekati batas atas saat permintaan tinggi, seperti Nataru. Sebagai antisipasinya, Adita sudah berkoordinasi dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh maskapai penerbangan.

"Sejak sebelum Nataru melakukan pertemuan ya, kepada maskapai. Jadi kami dengar masukan maskapai. Tapi

di situasi yang sekarang ini di Nataru tentunya pengawasan ditingkatkan," jelasnya.

Adita menambahkan Kemenhub akan menoleransi maskapai yang menaikkan tarif tiket asalkan tidak melebihi batas tarif atas yang sudah ditetapkan. Meskipun ada pelanggaran, Adita menyebut persentase maskapai yang melanggar pun lebih kecil dari totalnya. Hanya beberapa maskapai yang melanggar TBA. Namun, tetap saja Kemenhub akan memberikan sanksi tegas kepada maskapai yang melanggar.

"Kalau ada sanksi sering banget kita berikan dari yang ringan mulai dari teguran sampai yang berjenjang. Yang jelas si pengawasannya dan komunikasi terus sama maskapai," imbuhnya. (Ant, wid/ dya)

Kendalikan Inflasi Akhir Tahun, Pemkot Malang Fokus Intervensi Beras hingga Cabai

MALANG - Inflasi masih menjadi momok perekonomian di akhir tahun ini. Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengaku telah menyiapkan strategi pengendalian jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Menurutnya, melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang telah memproyeksikan potensi lonjakan inflasi yang diakibatkan dari komoditas cabai rawit, cabai merah, bawang merah, beras, dan gula pasir.

"Nah high level meeting ini, itu sebagai salah satu intervensi untuk bisa mengantisipasi dan menekan angka inflasi. Ada beberapa komoditi pangan yang harus kita intervensi," ujar Wahyu, ditemui usai memberikan arahan pada kegiatan HLM tersebut, Selasa (19/12/2023).

Wahyu menambahkan, untuk mengantisipasi lonjakan ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana untuk menggelar kegiatan seperti operasi pasar dan pasar murah, sambil memonitor ketersediaan stok bahan pangan di pasar dan pada pihak distributor.

"Rencananya hari Kamis besok, kita operasi pasar, kita mengadakan



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat melakukan sidak pasar di Pasar Bunulrejo Kota Malang, November 2023. (Santi/Lenteratoday)

pasar murah, kemudian nanti ke beberapa lokasi untuk antisipasi terkait dengan nataru," tambahnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga menjelaskan bahwa lonjakan harga cabai tidak hanya terjadi di Kota Malang, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia juga mengalami kenaikan harga yang tidak terkendali. Yang dipengaruhi oleh ketersediaan stok dan kondisi iklim, sehingga memengaruhi produksi cabai di pasaran.

"Sebetulnya juga tingkat inflasi kita fluktuatif. Kalau dilihat dari persentase sebetulnya masih terkendali. Karena kita saat ini menjelang nataru, kecenderungan rata-rata semua harga bahan pokok naik. Kemudian apabila kita bandingkan dengan kabupaten/kota yang lain, kita masih sedikit aman. Tapi kami tetap berfokus untuk bisa mengendalikan inflasi ini," paparnya.

Sementara itu, diketahui berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) Kota Malang, angka inflasi di Kota Malang diketahui terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dari 0,18 persen di bulan September, meningkat menjadi 0,26 persen di bulan Oktober, dan mencapai 0,40 persen di November 2023.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) yang dikelola oleh Disperindag Jawa Timur. Harga kebutuhan bahan pokok seperti komoditi beras di Pasar Dinoyo, Pasar Klojen, Pasar Oro-oro Dowo, Pasar Tawangmangu, Pasar Besar, dan Pasar Blimbing Kota Malang, cenderung stabil per Selasa (19/12/2023).

Sedangkan, untuk komoditi cabai seperti cabai merah, cabai rawit, dan cabai merah keriting, cenderung mengalami penurunan harga sekitar Rp 3.000-9.000 per kilonya. Hal serupa juga terjadi pada harga gula pasir, dari Rp 16.333 menjadi Rp 16.250. Namun, harga bawang putih di 6 pasar Kota Malang tersebut diketahui mengalami kenaikan dari Rp 31.667 menjadi Rp 32.500, kemudian untuk bawang merah naik menjadi Rp 31.667 dari Rp 30.500. (Santi/dya)

Realisasi IKD di Kabupaten Malang Terganjil Minimnya Pemahaman Teknologi Warga

MALANG - Pemahaman dan keterbatasan teknologi masih menjadi tantangan di masyarakat. Hal tersebut akhirnya juga mempengaruhi upaya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Malang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dikabupaten Malang, Subianto. Menurutnya, dari jumlah target sebanyak 500 ribu jiwa, baru 69.802 penduduk Kabupaten Malang yang telah berhasil mengaktifkan IKD.

"Jadi paling tidak untuk Kabupaten Malang, itu targetnya 500 ribu jiwa. Ya, memang perlu memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa KTP itu tidak hanya fisik. Oleh karena itu kita perlu masifkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar Subianto, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (18/12/2023).

Subianto menambahkan, keterbatasan terhadap akses teknologi juga menjadi masalah serius. Menurutnya, tidak seluruh masyarakat di Kabupaten Malang memiliki perangkat yang mendukung untuk mengaktifkan IKD.

"Tidak semua masyarakat kita

punya HP yang support, itu yang penting. Karena kalau gak punya HP, kan gak bisa buat IKD. Itu yang nanti harus kita upayakan," jelasnya.

Artinya hingga saat ini pencapaian baru 13 persen dari target. Meski demikian, Subianto menegaskan Pemkab Malang telah berhasil meraih peringkat kelima di Provinsi Jawa Timur dalam hal capaian IKD. Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan upaya keras yang telah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya juga mengaku optimistis bahwa dengan usaha yang berkelanjutan, target aktivasi IKD dapat tercapai dengan lebih baik di masa mendatang. "Kita berada di peringkat kelima dari 38 kota/kabupaten se Jawa Timur. Ini menunjukkan kerja keras kita untuk memahami masyarakat," terangnya.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) telah menetapkan target sebesar 25



Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dikabupaten Malang, Subianto. (Dok. Istimewa)

“

Jadi paling tidak untuk Kabupaten Malang, itu targetnya 500 ribu jiwa. Ya, memang perlu memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa KTP itu tidak hanya fisik. Oleh karena itu kita perlu masifkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.”

SUBIANTO

persen kepemilikan IKD dari jumlah penduduk di suatu daerah.

Sedangkan, dikutip dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Di tahun 2023 ini, jumlah penduduk berdasarkan pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan

di Kabupaten Malang, berjumlah sebanyak 2.703.175 jiwa. Yang artinya, kurang lebih sebanyak 500 ribu penduduk Kabupaten Malang diharapkan dapat mengaktifkan IKD untuk mencapai target tersebut. (Santi/dya)

ALDRIE INDRAYANA

Tampil di BRICS+ Fashion Summit Moskow

PERANCANG busana lokal, Aldrie Indrayana, mengharumkan nama Indonesia dengan memamerkan karyanya di BRICS+ Fashion Summit yang berlangsung di Moskow, sebuah peragaan busana dari berlangsung di Parking Gallery Zaryadye Park.

Gemerlap acara ini dipenuhi oleh para profesional di bidang fashion, termasuk para pembicara forum, pembeli, para influencer dan penikmat fesyen dari berbagai belahan dunia.

Ketika merancang koleksi busananya, perancang asal Indonesia ini beralih menggunakan metode upcycling, di mana dia memodifikasi barang-barang bekas yang dapat digunakan kembali oleh pelanggan dan memberinya tampilan baru.

Keseluruhan koleksi, termasuk yang ditampilkan di BRICS+ Fashion Summit, menampilkan nuansa grunge dan trendy gloom.

"Pada koleksi ini, kami turut mempresentasikan lebih banyak semburat warna gelap, humor yang suram, dan mengambil referensi dari gaya gotik," jelas Aldrie dalam keterangan resmi.

Gaya yang cenderung multi-layered dan sedikit sembrono yang

ditampilkan pada panggung catwalk dilengkapi dengan gaya rambut yang mewah, riasan yang berani, dan aksesoris yang unik. Bahkan, banyak model yang berjalan di catwalk tanpa alas kaki.

BRICS+ Fashion Summit dilangsungkan di Moskow dari 28 November hingga 2 Desember 2023. Selama 5 hari, Moskow menjadi pusat fesyen dunia dan mempertemukan para delegasi dari 60 negara.

Asia Tenggara diwakili BRICS+ Fashion Summit dengan 6 delegasi, termasuk Ali Charisma, Direktur Indonesian Fashion Chamber (Indonesia); Aldrie Indrayana, perancang womenswear; dan Jay Ishak, President of Malaysian Official Designers' Association (MODA) (Malaysia).

Selain itu, hadir pula Baltazar Magallon, Founder and Director of Manila International Film Festival and Manila Fashion Week (Filipina); Edward Kiti, Presiden dan Founder dari Association of Thai Silk and Culture Promotion, dan Thai Modelling Association; serta Presiden di Tourists Assistance Foundation (Thailand).

Konferensi ini mencakup banyak hal mulai program bisnis, Fashion Intensive Course dengan para profesor asal sekolah fashion dari 15 negara, showroom B2B dengan 130 desainer yang berpartisipasi, 11 fashion show dari 11 negara, festival film fashion short film World Fashion Shorts, dan masih banyak lagi.

BRICS+ Fashion Summit proyek baru yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan komunitas fashion internasional dalam menghadapi tantangan di industri fashion.

Prospek yang diharapkan oleh pasar global, serta berbagai peluang kolaborasi.

Acara utama summit ini berlangsung di Zaryadye Park, gedung konser serta lokasi-lokasi budaya dan sejarah terkemuka lainnya di Moskow.

Para delegasi penting yang turut hadir ke Moskow berasal dari sekitar 60 negara, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, Asia, Afrika, Eropa, dan negara lainnya.

Turut hadir dalam delegasi tersebut perwakilan dari asosiasi profesional dan fashion week, produsen, pembeli, desainer, pengajar

di universitas, hingga influencer.

Lebih dari 200 orang dari mereka berpartisipasi sebagai pembicara dalam diskusi dan sesi panel yang diadakan sebagai bagian dari Program Bisnis dari summit ini.

Program Bisnis menjadi salah satu kegiatan utama selama acara 5 hari tersebut.

Program ini menyatukan 3 unit yang berbeda yakni kolaborasi, yang berfokus pada joining forces untuk pengembangan sektor fashion; kewirausahaan, yang menyoroti prosedur bisnis dan isu-isu produksi; dan teknologi, yang menyoroti inovasi dalam industri fashion.

BRICS+ Fashion Summit menampilkan peragaan busana dengan desainer dari 12 negara (Berbagai sumber)



Aldrie Indrayana



PERBEDAAN PNEUMONIA PADA ANAK DAN DEWASA

PNEUMONIA merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang dapat menyerang orang dewasa dan anak-anak.

Namun, pneumonia memiliki berbagai ciri-ciri yang membedakan antara pneumonia pada anak dan pneumonia pada orang dewasa.

Pneumonia pada orang dewasa yang memiliki gejala yang jelas, biasanya ditandai dengan batuk, demam, serta memiliki tanda-tanda infeksi. Sedangkan, pneumonia pada anak sulit dideteksi.

Sebab, anak-anak tidak selalu mengalami batuk, demam, atau sesak napas. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kuman yang berbeda dari pada orang dewasa.

Anak-anak kerap mengalami pneumonia lebih sering daripada orang dewasa. Tidak hanya sistem kekebalan tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang, tetapi kuman seperti bakteri dan virus menyebar dengan sangat cepat dari anak satu ke anak lain, terutama anak-anak antara usia tiga dan enam tahun. Itulah sebabnya infeksi umumnya sangat umum pada anak-anak.

Sejumlah faktor lingkungan juga dapat meningkatkan risiko anak terkena pneumonia, misalnya paparan debu atau asap rokok, tinggal di pemukiman padat penduduk, dan polusi udara.

Untuk memastikan diagnosis pneumonia pada anak dan mengevaluasi kondisinya, dokter melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya, seperti tes darah, tes PCR, tes urine, dan foto Rontgen dada. Namun, pada kasus tertentu, dokter juga akan melakukan bronkoskopi.

Pengobatan pneumonia pada anak disesuaikan dengan penyebabnya. Umumnya, dokter akan meresepkan obat antibiotik untuk menangani pneumonia akibat infeksi bakteri, obat antivirus untuk pneumonia akibat infeksi virus, obat antijamur untuk infeksi jamur dan ibuprofen atau paracetamol untuk menurunkan gejala demam.

Jika kondisi pneumonia pada anak cukup parah, dokter akan memberikan anak terapi oksigen dan cairan infus, serta obat-obatan melalui suntikan.

Pneumonia pada orang dewasa lebih mudah terjadi pada orang dewasa berusia 55-65 tahun. Hal ini disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh seiring pertambahan usia.

Risiko infeksi penyakit pneumonia pada orang dewasa dapat dikurangi dengan pemberian vaksin. Terdapat dua jenis vaksin pneumonia yaitu vaksin PCV (pneumococcal conjugate vaccine) dan juga PPSV (pneumococcal

polysaccharide vaccine).

Pengobatan

Dokter Spesialis Paru RSUP Per Sahabatan Erlina Burhan memberikan cara penanganan bagi seseorang yang terjangkit Mycoplasma Pneumonia.

Erlina menjelaskan bahwa Mycoplasma Pneumonia berbeda dengan Influenza yang menyebar lewat virus. Mycoplasma Pneumonia itu kuman atau bakteri.

"Untuk Mycoplasma Pneumonia begitu terdeteksi maka berikanlah antibiotik, karena Mycoplasma Pneumonia itu kuman, tapi kalau influenza adalah virus tidak berguna jika diberikan antibiotik," katanya, dalam konferensi pers Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Dia mengatakan bahwa obat untuk orang yang terjangkit Mycoplasma Pneumonia adalah Azithromycin.

"Obatnya Azithromycin. Kalau kita bicara mengenai Mycoplasma Pneumonia dahaknya encer, tidak kental, dan tidak efektif dengan acetylsistine," ujarnya.

Acetylsistine tujuannya untuk memecah dahak, sehingga menjadi encer supaya mudah dikeluarkan, dan kalau dahak mudah dikeluarkan maka batuk tidak akan terjadi terus-menerus.

Sementara, Mycoplasma

Pneumonia dahaknya tidak kental, dahaknya encer, jadi menurutnya pemberian acetylsistine tidak tepat kalau indikasinya untuk mengencerkan dahak.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa jika pemberian acetylsistine dalam jangka waktu yang lama tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sistem imun itu bisa saja.

Seperti diketahui, menurut beberapa laporan kasus infeksi bakteri Mycoplasma Pneumonia sudah ditemukan di Jakarta. Laporan kasus itu diketahui berdasarkan pada hasil tes PCR (Bisnis)



META KEMBALI PISAHKAN CHAT MESSENGER DAN INSTAGRAM

INDUK Facebook (FB), Meta kembali memisahkan chat dari Messenger dengan Instagram (IG), setelah memungkinkan pengguna berkirim pesan lintas platform antara keduanya pada 2020 lalu.

Awalnya, chat dari Facebook Messenger dan Direct Message Instagram memang terpisah. Namun sejak 2020, chat dari kedua aplikasi itu bisa digabungkan, seiring dengan misi Meta "cross-app chat" alias obrolan lintas aplikasi di satu tempat.

Saat itu, Meta menjanjikan pengalaman mengobrol yang nyaman terlepas dari aplikasi mana yang dipakai pengguna, bisa Messenger atau Instagram.

Dengan dukungan chat lintas aplikasi, pengguna bisa mengobrol dengan sesama teman di Facebook atau Instagram lewat dua opsi aplikasi tadi.

Namun kini Meta memutuskan integrasi tersebut. Jadi, keputusan kali ini bisa dibalik kembali ke pengaturan awal, yakni chat-nya terpisah di masing-masing aplikasi.

Keputusan itu terlihat dari penjelasan yang tercantum di halaman dukungan Instagram. Menurut laman Pusat Bantuan Instagram, chat lintas aplikasi akan disetop dukungannya pada pertengahan Desember 2023. Artinya, dukungan itu sebentar lagi akan diputus.

Lewat laman yang sama, perusahaan menjelaskan perubahan apa saja yang akan terjadi setelah integrasi chat dihapuskan. Berikut rinciannya.

- Pengguna tidak bisa memulai obrolan atau telepon baru dengan akun Facebook dari Instagram.

- Obrolan yang sudah dilakukan



sebelumnya dari IG dengan akun FB, hanya bisa dibaca. Jadi, pengguna tidak bisa mengirim pesan baru lewat chat lama.

- Akun FB tidak bisa melihat status pengguna IG apakah aktif atau tidak. Mereka juga tidak akan melihat status apakah pesan terbaca atau belum.

- Obrolan dengan akun FB tidak akan dipindahkan ke kotak masuk di Facebook atau Messenger.

Dengan perubahan itu, nantinya bila pengguna ingin mengobrol dengan teman di Facebook, bisa dilakukan lewat aplikasi Messenger atau Facebook.

Meta tidak menjelaskan alasan di balik disetopnya dukungan chat lintas aplikasi yang tergabung dalam ekosistemnya. Namun ada kemungkinan hal ini terkait dengan Undang-Undang Pasar Digital (DMA) Eropa.

Regulasi itu meminta perusahaan seperti Meta untuk menawarkan interoperabilitas antar platform pengiriman pesan atau integrasi dengan pihak ketiga.

Nah, dengan memutuskan dukungan integrasi pesan Messenger-Instagram, Meta bisa menyiapkan interoperabilitas yang lebih luas lagi, sesuai ketentuan DMA.

Hapus dukungan SMS dari Messenger

Tidak hanya memutuskan dukungan chat antar aplikasi dari IG dan Messenger, Meta Agustus lalu juga menyedot dukungan SMS dari Messenger setelah tersedia sejak tahun 2016.

Semula, pengguna bisa mengirimkan SMS lewat Messenger, bukan hanya berkirim chat antar sesama pengguna Messenger saja.

Dengan dihentikannya dukungan SMS, artinya pengguna tidak bisa lagi mengirimkan pesan teks alias SMS dari

Messenger.

Berdasarkan posting perusahaan, dukungan SMS di Messenger disetop setelah 28 September 2023. Meta tidak menjelaskan alasan di balik dihentikannya dukungan SMS dari Messenger.

Perusahaan hanya menganjurkan pengguna untuk memakai aplikasi pesan bawaan ponsel, misalnya Google Messages atau Samsung Messages.

Melansir investor.fb.com, tujuan didirikannya Meta adalah membangun teknologi yang dapat membantu orang untuk terhubung, menemukan komunitas, dan mengembangkan bisnis. Meta berambisi untuk bergerak melampaui layar dua dimensi menuju pengalaman mendalam seperti augmented dan virtual reality untuk membantu membangun evolusi berikutnya dalam teknologi sosial.

Facebook Inc. resmi berganti nama menjadi Meta Platforms Inc. pada 29 Oktober 2021. Mark Zuckerberg mengungkapkan alasan perubahannya, yang berawal dari perusahaan sosial media menjadi cakupan perusahaan yang lebih luas.

Tak sembarangan memilih nama, ia berjuar bahwa pemilihan nama meta biasa digunakan untuk menggambarkan dunia virtual baru. Menurut Zuckerberg, Meta bisa menjadi masa depan internet seluler yang bisa diandalkan. Sebab, selama ini manusia sudah sangat mengandalkan internet untuk saling berinteraksi.

Sebelumnya, Facebook telah memiliki banyak produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Produk-produk tersebut adalah Whatsapp, Instagram, bahkan Facebook itu sendiri (Kompas)

HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

PUASA MEDIA SOSIAL ATASI GANGGUAN MENTAL

PUASA media sosial a.l menjadi solusi mengatasi gangguan mental terutama bagi kaum milenial dan gen Z yang hidup dengan kondisi teknologi yang pesat.

Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Alfiah Nabilah Masturah, menilai sama pentingnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga memiliki peran yang krusial bagi seseorang. Dewasa ini, banyak yang beranggapan bahwa generasi milenial dan Z adalah generasi yang mudah rapuh dan rentan terkena gangguan mental.

"Hidup di tengah perkembangan zaman yang serba modern ini memang penuh tantangan, tetapi kita tidak bisa langsung menilai bahwa generasi milenial dan generasi Z adalah generasi yang lemah," ujarnya.

Setiap generasi, menurutnya, memiliki kesulitannya masing-masing dalam menjalani hidup. Bagi kaum milenial dan gen Z, hidup dengan kondisi teknologi yang pesat adalah salah satu tantangannya.

Mereka kerap dihadapkan pada kehidupan yang seolah-olah nyata, padahal itu hanya dunia maya. Semua sibuk mengunggah pencapaian dan kesuksesannya di media sosial.

Tanpa sadar, hal itu membuat mereka sering membandingkan hidup dengan orang lain. Bahkan tak jarang membuat mereka merasa insekyur.

Dia menjabarkan, dalam sudut pandang psikologi, kondisi ini akan sangat berbahaya. Bukan tidak mungkin juga mengganggu kesehatan mental.

"Kesehatan mental itu erat kaitannya dengan sejahtera atau wellbeing yang turunannya adalah menerima, bersyukur, juga ikhlas," ujarnya.

Karenanya, hal yang paling penting dalam mental health menurut Alfiah adalah menerima diri. Memahami bahwa di dunia, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikontrol.

Perlu disadari pula, kata dia, setiap diri memiliki kemampuan untuk memberikan batasan atas apapun.

Demi menjaga kesehatan mental, seseorang berhak menarik diri dan bersikap cuek pada hal-hal yang memang mengganggu tujuan hidup.

Alfiah juga mengingatkan bahwa kesehatan mental adalah kunci bahagia hidup. Menerima diri,

kontrolling emosi, hidup di lingkungan yang positif, bijak bersosial media dan tidak banyak membandingkan hidup dengan orang lain menjadi 'keahlian' yang perlu dikuasai seseorang.

"Kalau sudah merasa mental kita rapuh bahkan mengarah ke stres yang berlebihan, cobalah untuk puasa sosial media," ujarnya menambahkan.

Dia menyarankan, puasa sosial media merupakan salah satu terapi psikologis yang sudah teruji dapat mengembalikan semangat serta kekuatan diri seseorang. Puasa media sosial merupakan upaya konkrit dalam menjaga kesehatan mental di tengah perkembangan teknologi.

"Dengan berpuasa medsos, kita akan terbiasa untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki, memiliki waktu untuk refleksi diri, fokus pada orang sekitar yang kita cintai, dan tidak membandingkan hidup dengan orang lain," ucapnya.

Mengutip halodoc, penggunaan media sosial dapat memengaruhi aktivitas fisik mulai dari kurang tidur, konsentrasi yang terganggu, sampai dengan depresi akibat tekanan

ataupun bullying.

Melansir dari Psychology Today, membatasi penggunaan media sosial kurang dari 30 menit sehari dapat membantu meningkatkan mood lebih positif.

Journal of Social and Clinical Psychology juga menyatakan bahwa salah satu pemicu depresi adalah kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain.

Perilaku negatif tersebut dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri dan pada akhirnya memicu depresi. (bisnis)

BEBERAPA CARA TERHINDAR DARI DAMPAK BURUK MEDIA SOSIAL,

1. Fokus pada keseimbangan. Pastikan anak remaja terlibat dalam interaksi sosial secara offline, dan punya waktu untuk aktivitas yang membantu membangun identitas dan kepercayaan diri.
2. Nonaktifkan pemberitahuan. Pengembangan aplikasi menjadi semakin agresif dengan pemberitahuan untuk memikat pengguna agar menghentikan apa pun yang mereka lakukan untuk terus terlibat dengan ponsel mereka. Di satu sisi notifikasi penting, tapi juga bisa mengganggu dan mengikat, menciptakan ketergantungan.
3. Perhatikan jika penggunaan media sosial mengganggu rasa percaya diri. Efek negatif media sosial dapat berdampak lebih besar ketika kepercayaan diri menurun (Bisnis)



"Dengan berpuasa medsos, kita akan terbiasa untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki, memiliki waktu untuk refleksi diri, fokus pada orang sekitar yang kita cintai, dan tidak membandingkan hidup dengan orang lain,"

Alfiah Nabilah Masturah

Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang,

Adu Kuat Dana ... (dari Hal 1)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah merilis laporan dana awal masing-masing calon wakil presiden-wakil presiden 2024. Dalam laporan periode 16-26 November 2023, di situs resmi KPU itu terungkap dana kampanye awal paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran yang terbesar. Total dana awal kampanye Prabowo-Gibran mencapai Rp 31.438.800.000 (Rp 31 miliaran). Bila dikonversikan ke harga mobil, dana awal kampanye paslon nomor urut dua itu setara dengan 19 Toyota Alphard terbaru.

"Iya, itu (laporan) yang kami publikasikan," kata Komisioner KPU RI Idham Holik, Selasa (19/12/2023).

Pada laman tersebut, tercantum laporan kampanye beserta dana kampanye yang dilaporkan oleh tiga kandidat calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. Ketentuan mengenai pelaporan dana kampanye ini sebelumnya telah diatur KPU dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 yang terbit pada 1 September 2023.

Merujuk ketentuan tersebut dana kampanye untuk Pemilu 2024 dapat diperoleh dari perseorangan maupun kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah. Meski begitu sumbangan dana kampanye yang boleh diterima dari sejumlah sumber itu dibatasi nominalnya.

Merujuk PKPU jumlah sumbangan yang boleh diterima oleh pasangan capres dan cawapres adalah senilai Rp 2,5 miliar yang berasal dari perorangan. Sedangkan sumbangan dari perusahaan dan organisasi non-pemerintah paling besar senilai Rp 25 miliar.

Sesuai ketentuan untuk laporan awal ketiga pasangan capres dan cawapres telah melaporkan dana awal kampanye untuk periode 16-26 November 2023. Dilansir pada Selasa (19/12/2023), dana awal kampanye pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tercatat berjumlah Rp 1 miliar.

Dana tersebut berupa uang yang berasal dari saku pasangan tersebut. Dalam laporan dana kampanyenya, pasangan Anies - Muhaimin tidak menerima sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk kolom sumbangan pihak lain perseorangan, sumbangan pihak lain kelompok, sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah juga kosong. Anies-Muhaimin diusung oleh Koalisi perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi paslon dengan dana awal kampanye terbesar yakni senilai Rp 31,43 miliar. Jumlah ini termasuk yang terbesar dibanding dana kampanye calon lain. Sumbernya, Rp 2 miliar dari pasangan calon berbentuk uang. Selain itu juga ada Rp 600 juta dari partai politik atau gabungan partai politik berbentuk barang.

Sumbangan cukup besar dari gabungan partai politik senilai Rp 28.838.800.000 berbentuk jasa. Tak ada sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan, sumbangan pihak lain kelompok, serta sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, PSI, dan Garuda.

Sementara, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki dana awal kampanye senilai Rp 23,32 miliar. Sumbangan itu berasal dari pasangan calon Rp 100 juta berbentuk uang. Ganjar - Mahfud juga menerima sumbangan partai politik atau gabungan partai politik uang senilai Rp 2,95 miliar. Kemudian sumbangan pihak lain perseorangan dalam bentuk uang Rp 1,6 juta.

Laporan dana kampanye Ganjar - Mahfud juga mengungkap adanya sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha non-pemerintah senilai Rp 20,32 miliar. Sehingga bila dijumlah total penerimaan dana awal kampanye Ganjar - Mahfud bernilai Rp 23,32 miliar.

Dalam kolom penerimaan lain-lain, tercatat bunga bank senilai Rp 293.487,37. Kemudian penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye Rp 20 juta. Adapun untuk pengeluaran pasangan Ganjar - Mahfud melaporkan adanya biaya untuk rapat umum senilai Rp 10 juta berupa uang dan Rp 10 juta berupa barang.

Selain itu juga ada pembuatan bahan desain Rp 20 juta serta pengeluaran lain-lain senilai Rp 3,4 miliar. Dalam laporan itu, Ganjar - Mahfud juga disebut membayar biaya administrasi bank senilai Rp 756 ribu sehingga total pengeluaran menjadi Rp 3,4 miliar berupa uang dan Rp 10 juta berupa barang. Dalam Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Perindo.

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye. Rencananya, kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tak ada Akuntabilitas di Aturan Pemilu

Di sisi lain, isu lonjakan transaksi janggal terkait dana kampanye kembali berembus menjelang Pemilu 2024. Pengamat menganggap isu ini muncul tiap pemilu karena regulasi kepiluan didesain agar pertanggungjawaban dana kampanye tak

bisa diwujudkan.

Dosen pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, melontarkan pendapat ini setelah meneliti sejumlah aturan kepiluan. "Saya menilai memang pengaturan dana kampanye kita itu secara sistemik didesain untuk tidak mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye," ujar Titi.

Titi mendasarkan argumennya itu pada fakta bahwa dalam aturan kepiluan, cakupan laporan yang harus diserahkan peserta pemilu dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat terbatas.

Namun, Titi menganggap keterbatasan ini sebenarnya dapat dijawab dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan instrumen hukum di luar kepiluan, serta menggandeng instansi lain, termasuk PPKATK.

Titi menganggap laporan semacam ini berulang karena regulasi kepiluan Indonesia memang didesain secara sistematis agar pertanggungjawaban dana kampanye pemilu tak bisa terwujud.

"Saya menilai memang pengaturan dana kampanye kita itu secara sistemik didesain untuk tidak mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye," ujarnya. "Terlalu banyak celah, terlalu banyak penyimpangan, tetapi sangat lemah pengawasan dan bahkan minim penegakan hukum."

Titi lantas menjabarkan bahwa celah itu dapat dilihat dari betapa sempit aturan terkait cakupan dana yang harus dilaporkan hingga pengawasan penggunaannya.

Ia kemudian mengambil contoh bahwa selama ini, pelaporan dana kampanye dalam UU Pemilu dan peraturan KPU hanya dimaknai sebagai dana-dana yang digunakan "di periode kampanye".

"Faktanya, banyak sekali dana beredar yang keluar sebelum masa kampanye, hari tenang, hari pemungutan suara, sampai setelah hari pemungutan suara, ketika rekapitulasi, bahkan sampai proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Titi.

"Pada tenggat-tenggat itu, tidak bisa ditagih akuntabilitasnya karena yang dilaporkan hanya dana di masa kampanye."

Laporan dana kampanye selama ini hanya berpaku pada duit yang dikeluarkan selama 'masa kampanye'. Selain itu, Titi juga membahas aturan dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur bahwa dana kampanye itu harus melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

"Faktanya adalah banyak sekali dana-dana yang tidak melalui RKDK, bahkan dikelola oleh pihak-pihak yang tidak menjadi bagian dari tim kampanye resmi. Misalnya, oleh relawan atau pihak-pihak di luar itu," tutur Titi, memperkuat dugaan PPKATK.

Titi kemudian merinci lebih jauh cara peserta pemilu mengelabui aturan mengenai RKDK tersebut. Menurut Titi, laporan dana kampanye untuk pemilu DPR/DPRD seharusnya dilaporkan melalui RKDK parpol.

Untuk pasangan calon presiden-wakil presiden, laporan dana kampanye dilakukan melalui RKDK masing-masing paslon. "Dalam praktik, caleg itu juga menerima dan mengelola dana kampanye, tapi tidak dilaporkan melalui partai politiknya," tuturnya. "Kita tidak mampu mengawasi fenomena itu, maknanya dari pemilu ke pemilu hampir tidak ada dana-dana yang beredar di luar RKDK, padahal itu digunakan untuk kepentingan pemenangan."

Titi melihat selama ini tidak ada upaya untuk mencegah penggunaan dana-dana kepentingan kampanye yang dikelola di luar RKDK. Praktik-praktik semacam inilah yang menurut Titi menimbulkan kejanggalan dalam laporan dana kampanye. "Hampir semua caleg mengeluhkan biaya politik yang tinggi, tapi ketika kita komparasi dengan laporan dana kampanyenya, semuanya normal, bahkan di bawah standar," ucap Titi.

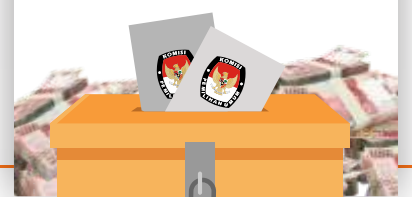
Manuver-manuver mengelabui aturan itu, kata Titi, kian marak karena selama ini tidak ada upaya untuk mencegah penggunaan dana-dana kepentingan kampanye yang dikelola di luar RKDK. "Jadi, kesadaran untuk patuh pada aturan main di mana hanya boleh dana dari RKDK itu tidak ditegakkan, alias hanya basa-basi," ujar Titi.

Senada, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil, juga mendesak agar Bawaslu segera berkoordinasi dengan PPKATK.

"Bawaslu harus segera berkoordinasi dengan PPKATK untuk mengecek beberapa hal, salah satunya apakah benar ada aliran dana itu masuk ke calon anggota legislatif yang saat ini sedang berkampanye?" ujar Fadli.(wid,rls,ist/dya)

ATURAN DANA KAMPANYE

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peserta kampanye memang harus mengirimkan laporan dana kampanye selambatnya 15 hari setelah pemungutan suara.
- Jika tidak, mereka akan didiskualifikasi dari pertarungan pemilu. Selain itu, mereka juga harus memastikan laporan dana kampanye yang mereka buat benar.
- Pasal 496 dan 497 UU Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan partai atau orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dapat dijera sanksi penjara atau denda.
- Bagi partai pemilu, ancamannya pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp12 juta. Untuk perseorangan, ancaman hukumannya berupa pidana bui paling lama dua tahun dan denda hingga Rp24 juta





SEGENAP PIMPINAN DAN STAF DPRD KOTA
SURABAYA MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI NATAL

25 DESEMBER 2023



Adi Sutarwijono S.IP
Ketua



Hj Laila Mufidah S.Ag
Wakil Ketua



Drs. A.H. Thony, M.Si
Wakil Ketua



Reni Astuti S.Si
Wakil Ketua